

## **IMPLEMENTASI LANDASAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI SD NEGERI CIPICUNG 1**

Muhammad Hifni Fajriani<sup>1</sup>, Eka Ulfiani<sup>2</sup>, Sholeh Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>1</sup>hifnifajriani1@gmail.com, <sup>2</sup>ekaulfiani@gmail.com, <sup>3</sup>sholeh.hidayat@untirta.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research analyzes the implementation of juridical foundations in education management in primary schools in Indonesia, focusing on regulations such as Law No 20 of 2003 on the National Education System. Using a qualitative approach, data was obtained through interviews, observations and document analysis in several primary schools. The results show that although regulations are in place, implementation still faces challenges, including a lack of policy understanding and limited resources. This study recommends training for educators as well as strengthening the synergy between central and local governments to ensure effective and compliant education management.*

*Keywords: Juridical foundation, education management, primary school*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi landasan yuridis dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dasar di Indonesia, berfokus pada peraturan seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen di beberapa sekolah dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman kebijakan dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan bagi tenaga pendidik serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan pendidikan yang efektif dan sesuai aturan.

Kata Kunci: Landasan yuridis, pengelolaan Pendidikan, sekolah dasar

#### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dengan kualitas pendidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin dengan tujuan tertentu. Seperti pada pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas yang menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup. Pendidikan khususnya di sekolah memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan pendidikan di sekolah tidak dapat dianggap sebagai hal yang mudah. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kesiapan guru dalam membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Melihat peran dan posisi strategis yang dihadapi guru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, maka sudah selayaknya jika guru senantiasa meningkatkan mutu sehingga kemampuan profesionalnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (Ali Muhson, 2004: 2).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Guru dapat dikatakan profesional dan efektif apabila guru mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya dan berhasil mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan pendidikan bermakna atau pendidikan yang efektif dimana siswa belajar secara aktif dan terlibat secara aktif partisipatif dalam mengkonstruksi pengetahuannya diperlukan guru berkarakter yaitu guru pembelajar yang mampu menjadi fasilitator cerdas bagi siswanya. Guru tidak lagi “mengajar” secara satu arah, tetapi “membelajarkan” anak secara aktif, kreatif, dan inovatif. Sehingga anak senang terlibat dalam pembelajaran dan anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. (Mustadi, et al'2018: 2)

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi acuan

dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, landasan ini berakar pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan undang-undang terkait seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan hukum ini memastikan bahwa pendidikan diselenggarakan secara adil, berkualitas, dan merata untuk semua warga negara. UU No. 20 Tahun 2003 mengatur bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik. Di tingkat sekolah dasar (SD), undang-undang ini memberikan pedoman tentang wajib belajar, kurikulum, dan pendanaan melalui kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan akses pendidikan dasar yang berkualitas.

Landasan yuridis pendidikan juga merupakan dasar tumpuan secara hukum yang dipandang sebagai aturan baku dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan (Mustadi, et al'2018: 51). Landasan yuridis pendidikan bersifat ideal dan normative, artinya merupakan sesuatu yang diharapkan

dilaksanakan dan mengikat untuk dilaksanakan oleh setiap pengelola, penyelenggara dan pelaksana pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional (Wahyudin, et al'2009: 2.7). Landasan yuridis pendidikan di Indonesia antara lain Pancasila, UUD 1945, sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah tentang pendidikan, dan lain-lain.

Pendidikan dasar merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan pengetahuan anak. Sekolah dasar mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan pendidikan di jenjang lebih tinggi. Filosofi pendidikan dasar di Indonesia mencerminkan kebutuhan untuk mendukung pengembangan individu secara holistik melalui pendekatan psikologis, sosial, dan yuridis.

Dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan pendidikan nasional diterapkan secara efektif. Namun, tantangan seperti alokasi anggaran, distribusi sumber daya, dan pengawasan kerap memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi

kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi atau lemahnya kapasitas manajemen di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan bagi para pendidik dan administrator menjadi prioritas.

Dana BOS telah menjadi instrumen utama untuk mendukung operasional sekolah dasar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini masih menjadi tantangan utama. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diatur dalam Perpres No. 87 Tahun 2017 menekankan perlunya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program ini bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Pendidikan dasar berlandaskan pada prinsip mendewasakan anak secara sistematis dan berkesinambungan. Teori pendidikan seperti konstruktivisme dan humanisme mendukung pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, yang relevan untuk pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia.

Untuk memastikan kebijakan pendidikan tetap relevan, evaluasi berkelanjutan diperlukan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi, seperti kesenjangan mutu pendidikan antara kota dan desa. Pendidikan dasar yang kuat dan berbasis landasan yuridis yang jelas akan menjadi fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu ada komitmen dari semua pihak untuk memperkuat sistem pendidikan nasional demi mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

## **B. Metode Penelitian**

Pada Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di SD Negeri Cipicung 1, Jl. Labuan Kp. Gong-gong, Desa Cipicung, Kec. Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penelitian ini berfokus pada konteks, proses, dan pemaknaan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan. Tahapan penelitian meliputi wawancara, observasi, analisis dokumen. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan

sekunder dengan dokumen kebijakan, laporan tahunan sekolah, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan triangulasi data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data yang terkumpul. Untuk memastikan validitas dan keandalan data, penelitian ini untuk memberikan gambaran rinci tentang bagaimana landasan yuridis diterapkan dalam pengelolaan pendidikan dasar, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana landasan yuridis diterapkan dalam pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cipicung 1, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasinya. Temuan penelitian meliputi:

#### 1. Pemahaman Tentang Landasan Yuridis

Wawancara dengan kepala sekolah dan guru menunjukkan bahwa mayoritas pemangku kepentingan memahami secara mendasar pentingnya regulasi, seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam

mengarahkan kebijakan pendidikan. Namun, pemahaman mereka lebih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis yang lebih spesifik.

*Tabel 1 Hasil Pemahaman Kepala Sekolah Dan Guru*

| Aspek                                     | Temuan   | Catatan  |
|---|--|--|
| <b>Pemahaman Umum Regulasi</b>            | Mayoritas memahami UU No. 20 Tahun 2003 sebagai landasan penting kebijakan pendidikan. | Pemahaman terbatas pada prinsip dan tujuan umum.           |
| <b>Pemahaman Aspek Teknis</b>             | Belum memahami detail teknis terkait implementasi regulasi.                            | Misalnya, ketentuan operasional pendidikan inklusif.       |
| <b>Kesadaran akan Pentingnya Regulasi</b> | Kepala sekolah dan guru menyadari pentingnya regulasi dalam mengarahkan kebijakan.     | Tidak ada sosialisasi khusus terkait pasal-pasal tertentu. |
| <b>Kebutuhan tambahan</b>                 | Perlunya pelatihan atau sosialisasi lebih lanjut terkait aspek teknis regulasi.        | Untuk mendukung implementasi regulasi secara efektif.      |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemangku kepentingan memahami pentingnya landasan yuridis, implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa pemahaman regulasi yang memadai menjadi prasyarat penting untuk keberhasilan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah

#### 2. Implementasi Kebijakan

##### a. Kurikulum

Implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan sesuai

dengan regulasi nasional. Namun, kendala ditemukan pada kesiapan tenaga pengajar dalam memahami materi berbasis kompetensi.

*Tabel 2 Hasil Pemahaman kurikulum*

| Aspek                        | Implementasi  | Hambatan   | Upaya Solusi                                   |
|------------------------------|---|--|--|
| <b>Struktur kurikulum</b>    | Penyesuaian beban belajar dengan fokus pada kompetensi. | Belum ada panduan teknis lengkap.                  | Penyusunan modul ajar lokal.                   |
| <b>Metode pembelajaran</b>   | Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning).  | Guru belum terbiasa dengan metode ini.             | Pelatihan intensif untuk guru.                 |
| <b>Saran dan prasarana</b>   | Penggunaan media digital dan ruang belajar yang aktif.  | Kurangnya perangkat teknologi dan infrastruktur.   | Peningkatan dana operasional untuk alat bantu. |
| <b>Evaluasi pembelajaran</b> | Berbasis asesmen formatif sesuai kebutuhan siswa.       | Guru kesulitan memahami asesmen Kurikulum Merdeka. | Pendampingan teknis oleh pengawas sekolah.     |

Kurikulum Merdeka di SD Negeri Cipicung 1 memberikan peluang inovasi dalam pembelajaran, tetapi keberhasilan implementasi membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, kepala sekolah, dan pelatihan guru secara berkala.

#### b. Pendanaan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan secara transparan, tetapi terdapat tantangan dalam pengelolaannya karena keterbatasan

administrasi dan kurangnya pelatihan keuangan untuk staf.

*Tabel 3 hasil pendanaan*

| Aspek                       | Implementasi   | Hambatan                                       | Upaya Solusi                                   |
|-----------------------------|--|--|--|
| <b>Perencanaan anggaran</b> | Penyusunan rencana sesuai pedoman Kemendikbudristek. | Keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan lokal. | Pelatihan kepala sekolah dan komite.           |
| <b>Pengelolaan dana</b>     | Dilakukan secara transparan dengan laporan rutin.    | Keterbatasan staf administrasi terlatih.       | Pendampingan teknis dari pemerintah daerah.    |
| <b>Penggunaan dana</b>      | Untuk buku, honor guru honorer, dan infrastruktur.   | Dana tidak mencukupi kebutuhan sekolah.        | Diversifikasi sumber pendanaan dari CSR lokal. |
| <b>Pelaporan keuangan</b>   | Melalui sistem digital (AR BOS) sesuai aturan.       | Kesulitan teknis dalam penggunaan sistem.      | Penyediaan perangkat dan pelatihan sistem AR.  |

Implementasi kebijakan dana BOS di SD Negeri Cipicung 1 membantu sekolah menjalankan operasional dasar meski menghadapi kendala seperti keterbatasan administrasi dan keterlambatan pencairan. Solusi berupa pelatihan staf dan optimalisasi sumber daya lokal dapat memperkuat efektivitas penggunaan dana ini, sehingga tujuan pemerataan pendidikan tercapai.

### 3. Peran Pemangku Kepentingan

Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan operasional. Namun, koordinasi dengan pihak pemerintah daerah

terkadang terkendala oleh birokrasi yang panjang. Guru dan komite sekolah memiliki keterlibatan yang baik dalam diskusi kebijakan, tetapi keterbatasan sumber daya memengaruhi efektivitasnya.

*Tabel 4 hasil pengaku kepentingan*

| Pemangku Kepentingan        | Peran Utama  | Tantangan  | Strategi Penguatan Peran                              |
|-----------------------------|--|--|---|
| <b>Kepala sekolah</b>       | Memimpin penerapan kebijakan pendidikan.<br>-<br>Mengelola sumber daya sekolah.      | Keterbatasan sumber daya dan birokrasi lambat.   | Pelatihan manajerial dan kolaborasi dengan pemerintah |
| <b>Guru</b>                 | -<br>Melaksanakan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka.<br>-<br>Membimbing siswa. | Keterbatasan pemahaman terhadap kebijakan baru.  | Pelatihan rutin dan pendampingan teknis.              |
| <b>Komite sekolah</b>       | Membantu pengambilan keputusan.<br>-<br>Mendukung pengelolaan dana BOS.              | Kurangnya komunikasi dengan pihak sekolah.       | Meningkatkan transparansi dan keterlibatan aktif.     |
| <b>Orang tua Masyarakat</b> | Mendukung pendidikan anak di rumah.<br>-<br>Berppartisipasi dalam kegiatan sekolah.  | Rendahnya keterlibatan aktif sebagian orang tua. | Edukasi pentingnya peran mereka dalam pendidikan.     |
| <b>Pemerintah daerah</b>    | Menyediakan sumber daya finansial.<br>-<br>Memberikan pelatihan teknis.              | Proses birokrasi yang panjang.                   | Penyederhanaan proses pencairan dana dan monitoring.  |

Tabel ini mencerminkan kebutuhan akan sinergi dan dukungan antar

pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan pengelolaan pendidikan di sekolah.

#### 4. Faktor-Faktor Keberhasilan

a. Dukungan kepala sekolah yang visioner dan inovatif.

Dukungan kepala sekolah yang visioner dan inovatif menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, termasuk pengelolaan landasan yuridis di SD Negeri Cipicung 1. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana peran kepala sekolah mendukung keberhasilan:

- 1) Visi yang jelas
  - 2) Kemampuan beradaptasi dengan perubahan
  - 3) Pengelolaan sumber daya yang efektif
  - 4) Kepemimpinanyang kolaboratif
  - 5) Peningkatan kapasitas guru
  - 6) Mendorong inovasi pembelajaran
- b. Komitmen guru dalam melaksanakan tugas meskipun dengan fasilitas terbatas.

Komitmen guru dalam melaksanakan tugas meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan

pendidikan di SD Negeri Cipicung 1.

Berikut poinnya:

- 1) Dedikasi dalam mengajar
- 2) Pemanfaatan sumber daya alternatif
- 3) Pengelolaan kelas yang efektif
- 4) Kemampuan berinovasi
- 5) Kesabaran dan keuletan siswa
- 6) Focus pada kesejahteraan siswa

c. Partisipasi aktif komite sekolah dan masyarakat sekitar.

adalah kunci dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Komite sekolah berperan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, termasuk alokasi dana BOS dan pengembangan program sekolah. Sementara itu, masyarakat sekitar mendukung kegiatan pendidikan melalui kontribusi ide, sumber daya, atau partisipasi dalam kegiatan sekolah.

Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar-mengajar, memperkuat rasa memiliki, dan membantu sekolah menghadapi keterbatasan, baik dari segi dana maupun fasilitas.

## **5. Hambatan dan Solusi Implementasi**

### **1. Hambatan**

a. Keterbatasan fasilitas fisik, seperti ruang kelas dan media pembelajaran.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah keterbatasan fasilitas fisik di sekolah, termasuk ruang kelas dan media pembelajaran. Berikut mengenai dampaknya:

- 1) Ruangan kelas tidak memadai
- 2) Kurangnya media pembelajaran
- 3) Kualitas infrastuktur yang buruk
- 4) Keterbatasan fasilitas pendukung

b. Kurangnya pelatihan untuk tenaga pendidik terkait implementasi kebijakan baru.

Salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka atau pengelolaan dana BOS, adalah minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik. Berikut mengenai dampaknya:

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan baru
- 2) Kesulitan dalam implementasi praktis
- 3) Kurangnya dukungan berkelanjutan
- 4) Motivasi menurun

C, Proses birokrasi yang lambat dalam pendistribusian anggaran.

Lambatnya proses birokrasi dalam pendistribusian anggaran, termasuk dana BOS, menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Berikut dampaknya:

- 1) Keterampilan pencairan dana BOS
- 2) Prosedur administrasi yang kompleks
- 3) Minimnya koordinasi antarlembaga
- 4) Efek domino pada kegiatan sekolah

## 2. Solusi

- a) Pelatihan berbasis kompetensi : Guru perlu dibekali pelatihan rutin tentang implementasi kebijakan berbasis kurikulum terbaru.
- b) Penguatan Kapasitas Administrasi: Staf sekolah memerlukan pelatihan dalam pengelolaan dana BOS agar lebih efisien dan transparan.
- c) Sinergi Pemerintah dan Sekolah: Proses birokrasi perlu disederhanakan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada sekolah.

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi landasan yuridis dalam pendidikan dasar membutuhkan dukungan yang holistik dari berbagai

pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya.

Terhitung hingga 2 Desember 2024, di SD Negeri Cipicung 1 terdapat sekitar 16 tenaga kependidikan, yang di dalamnya sudah termasuk kepala sekolah, guru kelas, dan pegawai atau karyawan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

*Tabel 5 jumlah guru dan pegawai/karyawan*

| Jabatan          | Jumlah |
|------------------|--------|
| Kepala Sekolah   | 1      |
| Guru Kelas       | 6      |
| Pegawai/Karyawan | 8      |
| Total            | 15     |

Siswa yang menempuh pendidikan di SD Negeri Cipicung 1 didominasi oleh anak-anak yang bertempat tinggal di sekitaran lingkungan sekolah. Penerimaan peserta didik baru di SD Negeri Cipicung 1 didasarkan pada sistem rangking usia. Apabila anak yang mendaftar memiliki usia yang kurang dari 7 tahun, namun kuota masih tersedia maka anak tersebut tetap dapat diterima. Jumlah keseluruhan siswa di SD Negeri Cipicung 1 yaitu 165 dengan siswa laki-laki berjumlah 81 dan siswa perempuan berjumlah 84. Setiap kelas rata-rata berjumlah 23-30 siswa.

*Tabel 6 jumlah siswa*

| JENJANG | JUMLAH |
|---------|--------|
| 1       | 23     |

---

|              |            |
|--------------|------------|
| 2            | 28         |
| 3            | 28         |
| 4            | 29         |
| 5            | 27         |
| 6            | 30         |
| <b>TOTAL</b> | <b>165</b> |

#### **D. Kesimpulan**

Implementasi landasan yuridis dalam pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cipicung 1 menunjukkan dinamika yang melibatkan berbagai faktor keberhasilan dan hambatan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Kebijakan Pendidikan yang Berbasis Landasan Yuridis**

Landasan yuridis seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan pendidikan, termasuk penerapan Kurikulum Merdeka dan pengelolaan dana BOS. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan sinergi antara pihak sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat sekitar.

##### **2. Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan implementasi landasan yuridis didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah

yang visioner, komitmen guru dalam menjalankan tugas meski fasilitas terbatas, serta partisipasi aktif komite sekolah dan masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan.

##### **3. Hambatan Implementasi**

Beberapa hambatan yang ditemui meliputi keterbatasan fasilitas fisik, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta birokrasi yang lambat dalam pendistribusian anggaran. Hambatan ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program pendidikan, kurang optimalnya pembelajaran, dan penurunan motivasi guru dan siswa.

##### **4. Strategi Solusi**

Untuk mengatasi hambatan, diperlukan langkah strategis seperti pelatihan guru secara berkala, penyederhanaan prosedur birokrasi, pengadaan fasilitas pendukung secara bertahap, serta peningkatan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dengan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat, pengelolaan pendidikan yang

berbasis landasan yuridis di SD Negeri Cipicung 1 dapat berjalan lebih efektif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta meningkatkan kualitas pendidikan sesuai tujuan nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Muhson. 2004. Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan. *Curricula*. Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004. <https://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/curricula/article/download/1472/pdf>.
- Aprilia. 2017. Bab II Kajian Teori. <http://repository.ump.ac.id/4209/3/IMELDA%20APRILIA%20->
- Garnida, Dadang. 2015. Pengantar Pendidikan Inklusif. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Kusgiant, MHD. 2016. Bab II Kajian Teoretis. <http://repository.unpas.ac.id/13318/4/BAB%20II%20acc.pdf>.
- Mukaromah, U. 2016. Bab II Konsep Guru. <http://eprints.walisongo.ac.id/6102/3/BAB%20II.pdf>.
- Muryaningsih, Sri & Ali Mustadi. 2015. Pengembangan RPP Tematik-Integratif Untuk Meningkatkan Karakter Kerja Keras di Sekolah Dasar. *Researchgate*. Volume 3 – Nomor 2, Juli 2015, (190 - 201). [https://www.researchgate.net/profile/Ali\\_Mustadi/publication/307776591\\_](https://www.researchgate.net/profile/Ali_Mustadi/publication/307776591_).
- Mustadi, Ali, dkk. 2018. Landasan Pendidikan Sekolah Dasar. Yogyakarta: UNY Press.
- Nilantim, Anugraheni. 2019. Implementasi Landasan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Tegalpanggung. <http://nilantimanugraheni.blogs.uny.ac.id/2019/01/04/implementasi-landasan-pendidikan-sekolah-dasar-di-sd-negeri-tegalpanggung/>.
- Setyawan, Wawan Wahyu & Ali Mustadi. 2015. Pengembangan SSP Tematik-Integratif Untuk Membangun Karakter Disiplin dan Kreatif Siswa Kelas I SD. *JPE*. Volume 3 - Nomor 1, 2015. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpe/article/view/4072>.
- Sukmadinata, N. S. (2009). Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thaufan, Abiyuna R. 2017. Bab II Landasan Teoritis. [http://repository.upi.edu/33614/5/T\\_PKN\\_1502415\\_Chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/33614/5/T_PKN_1502415_Chapter2.pdf).
- Tilaar, H. A. R. (2002). Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudin, Dinn, dkk. 2009. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yanuarita, Widi Astuti & Ali Mustadi. 2014. Pengaruh Penggunaan Media Film Animasi Terhadap Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V SD. *JPE*. Volume 2 - Nomor 2, 2014.